



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Karanganyar



Jl. Mayjen Yudomo SHD, Bibis Jungke
Kec. Karanganyara, Kab. Karanganyar



[bpbdkaranganyar](#)



08112637243 / 0271-495 997

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dapat di selesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam kurun waktu setahun. Pada laporan ini, disajikan perencanaan kinerja tahun 2023, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini menjelaskan berbagai capaian dan permasalahan serta solusi yang mewarnai kinerja sepanjang tahun 2023. Kedepan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah akan senantiasa melakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menjadikan Perangkat Daerah yang lebih Profesional, Transparan, Inovatif serta BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Karanganyar.

Demikian *LKjIP* ini kami susun semoga dapat meningkatkan peran Perangkat Daerah dan peningkatan efisiensi, efektivitas, serta produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Karanganyar pada tahun mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Karanganyar, 31 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



HENDRO PRAYITNO, S.H., M.M.
Pembina Tk I
NIP. 19760531 199503 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan perangkat daerah yang menangani penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar. BPBD Kabupaten Karanganyar terbentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Program utama yang telah dilaksanakan atau dengan kata lain program utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Sedangkan program-program urusan pada semua SKPD di tetapkan untuk mencapai sasaran.

Penyusunan laporan kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran pada Tahun 2023 dan mengevaluasi atas capaian tersebut. Indikator kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar yang telah di tetapkan di Tahun 2023 sebagai berikut :

Sasaran Strategis Target Capaian BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|--|----------------------------------|--------|-----------|---------|
| 1. | Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat | %Desa/ Kelurahan Tangguh Bencana | 10,73 | 18,08 | 168% |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD | 72 | 69,65 | 97% |

Berdasarkan realisasi pelaksanaan program tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah 168% untuk sasaran Berkurangnya Resiko Bencana Yang Berdampak Pada Masyarakat. Untuk sasaran startegis Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah rata-rata capaian kinerja adalah 97%. Sedangkan, capaian kinerja anggaran yang telah di tetapkan adalah 93,83% dari target 100%. Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar untuk pembiayaan seluruh kegiatannya pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp 6.875.944.050 dan terealisasi Rp 6.451.365.954.

Meskipun pencapaian sasaran baik, tetapi dalam melaksanakan kegiatan masih terdapat hambatan/kendala yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja sasaran-sasaran tersebut diatas, yaitu :

1. Belum optimalnya penguatan masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana, hal ini dapat dilihat dari Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang masih sedikit.
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana
3. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
4. Belum optimalnya ketersediaan data bencana.

Langkah-langkah antisipatif dan korektif yang akan ditempuh guna perbaikan dalam rangka meningkatkan pencapaian kinerja sasaran tersebut, yaitu :

1. Mengurangi resiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu sesuai kebutuhan
2. Membangun system peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya.
3. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodic, cepat dan akurat.
4. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Mempercepat regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
6. Memperkuat kinerja antar lembaga terkait.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| IKHTISAR EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL..... | vi |
| DAFTAR GAMBAR | vii |
| BAB I | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Maksud dan Tujuan..... | 1 |
| C. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Karanganyar | 2 |
| D. Aspek Strategis | 13 |
| E. Isu Strategis | 14 |
| F. Landasan Hukum | 14 |
| G. Sistematika | 15 |
| BAB II | 17 |
| A. Perencanaan Strategis..... | 17 |
| B. Rencana Kinerja Tahunan | 21 |
| C. Perjanjian Kinerja | 21 |
| BAB III | 24 |
| A. Metode Pengukuran..... | 24 |
| B. Capaian Kinerja Organisasi | 26 |
| C. Realisasi Anggaran | 36 |
| BAB IV..... | 41 |
| A. Kesimpulan | 41 |
| B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja | 42 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel I. 1 Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin | 10 |
| Tabel I. 2 Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Eselon dan Tingkat Pendidikan | 11 |
| Tabel I. 3 Sarana dan Prasana BPBD Kabupaten Karanganyar | 11 |
| Tabel II. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar | 20 |
| Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 | 21 |
| Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 | 22 |
| Tabel II. 4 Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 | 23 |
| Tabel III. 1 Kriteria Penilaian | 25 |
| Tabel III. 2 Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan | 26 |
| Tabel III. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Capaian Indikator Tujuan | 27 |
| Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya Capaian Indikator Tujuan | 27 |
| Tabel III. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra | 28 |
| Tabel III. 6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023 | 29 |
| Tabel III. 7 Capaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023 | 30 |
| Tabel III. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya untuk Sasaran Strategis 1 | 30 |
| Tabel III. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah untuk Sasaran Strategis | 31 |
| Tabel III. 10 Capaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Tahun 2023 | 32 |
| Tabel III. 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya untuk Sasaran Strategis 2 | 32 |
| Tabel III. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah untuk Sasaran Strategis 2 | 33 |
| Tabel III. 13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 34 |
| Tabel III. 14 Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 | 36 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|---|
| Gambar I. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar | 4 |
|--|---|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggara daerah wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi, peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang di percayakan kepadanya.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD, dan wujud transparansi/pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan BPBD.

Evaluasi dan analisis dari hasil laporan ini dilakukan agar kualitas pelaksanaan program dan anggaran semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang positif dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang di percayakan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran BPBD Kabupaten Karanganyar selama tahun 2023 sebagai bentuk perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Gambaran Umum BPBD Kabupaten Karanganyar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan penanggulangan bencana. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 Bab 1 Pasal 1 tentang, Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang beresiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi garda terdepan dalam penanggulangan bencana di wilayah kabupaten Karanganyar yang terdiri dari 17 Kecamatan yang meliputi 177 Desa/Kelurahan (15 Kelurahan dan 162 Desa). Desa/Kelurahan tersebut terdiri dari 1.091 Dusun dan 2.313 Dukuh.

1. Tugas dan Fungsi Organisasi

a. Tugas BPBD

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bencana. Maka dari itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas pokok, yaitu:

- 1) Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- 2) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- 3) Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 4) Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.;
- 5) Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;

- 6) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- 7) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 8) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang undangan.

b. Fungsi BPBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi:

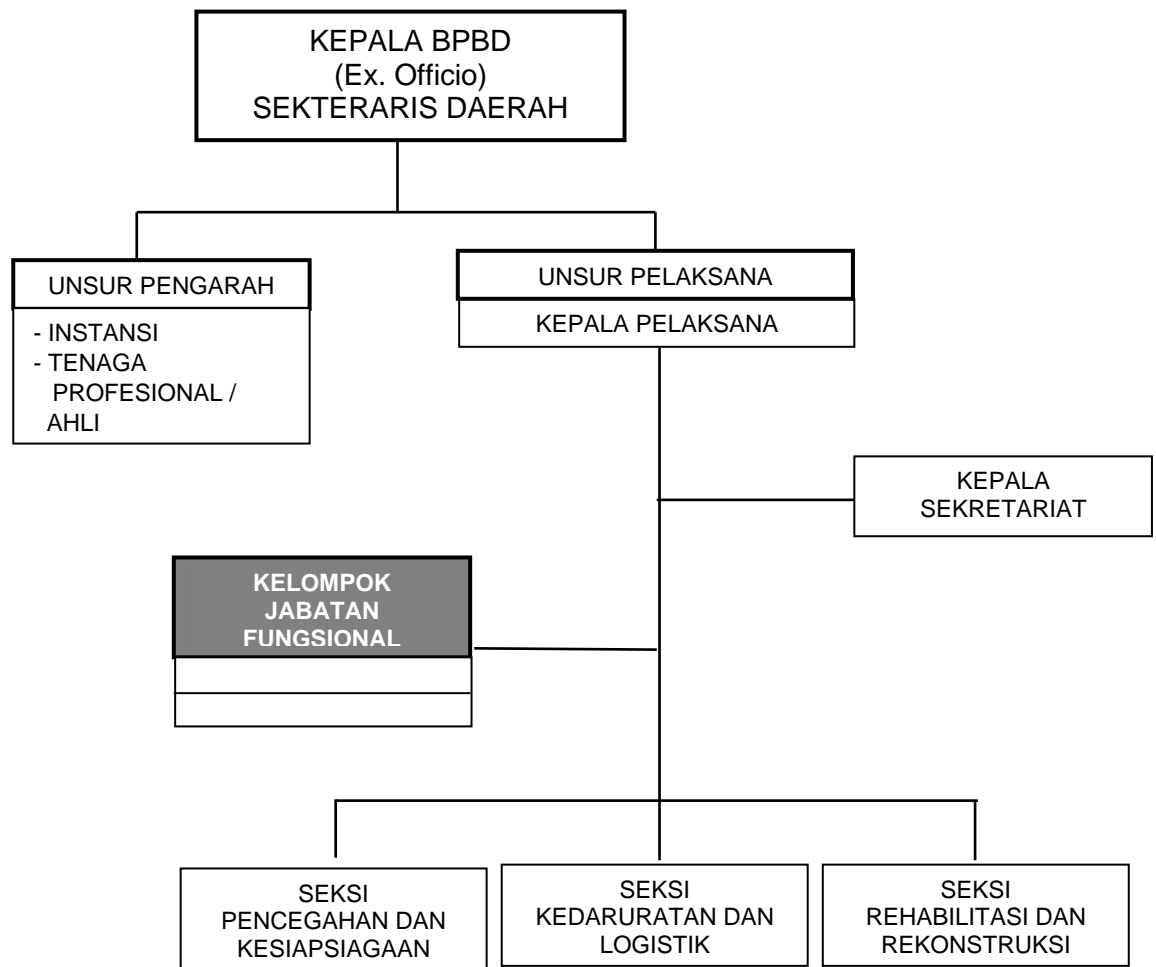
- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Susunan/Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu terdiri atas :

- a. Kepala BPBD (*ex - officio*);
- b. Unsur Pengarah
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari
 - 1) Kepala Pelaksana;
 - 2) Sekretariat;
 - 3) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 4) Seksi Kedaruratan dan Logistik; dan
 - 5) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. Kelompok jabatan fungsional.

**STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



Gambar I. 1 Struktur Organisasi BPBD Kabupaten Karanganyar

a. Kepala

Kepala Badan Penanggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar secara ex-officio di jabat oleh Sekretaris Daerah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karanganyar mempunyai tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan Bupati bidang Penanggulangan Bencana;
- 2) Menetapkan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;

- 3) Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- 5) Menetapkan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) Merumuskan kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- 7) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisidarurat bencana; dan
- 8) Melakukan tindakan cepat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
- 2) Koordinais pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- 3) Pengkoordinasian mobilisasi sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daera;
- 4) Pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
- 5) Pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran bantyan uang dan barang; dan
- 6) Pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.

b. Unsur Pengarah

Unsur pengarah berasal dari perangkat daerah terkait, pakar dan tokoh masyarakat

c. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas pokok, menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan teknis di bidang penanggulangan bencana;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bencana;

- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- 4) Pengkomandoa pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
- 5) Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas kesekretariatan, pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logisti serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanggulangan bencana;
- 7) Pengelolaan kesekretariatan unsur pelaksana; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah tanggung jawab kepada Kepala BPBD. Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari:

a) Kepala Pelaksana

Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar bertugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. Kepala pelaksana membawahi kepala kesekretariatan dan 3 (tiga) kepala seksi yaitu Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik dan Kepala Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki tugas, yaitu :

- (1) Melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
- (2) Menyusun kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Merumuskan pedoman dan rencana kerja terhadap pelaksanaan kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- (4) Merumuskan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (5) Menyusun bahan penetapan dan informasi peta rawan bencana dan peta evakuasi;
- (6) Merumuskan prosedur tetap penanganan bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Menyusun kebutuhan anggaran rencana kerja dan pelaksanaan anggaran untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- (8) Mempersiapkan bahan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- (9) Melaksanakan tindakan cepat yang diperintahkan atasan terkait penanggulangan bencana daerah;
- (10) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lainnya yang sah yang dikuasakan oleh Kepala BPBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (11) Mengumpulkan dan menyalurkan bantuan uang dan barang;
- (12) Menyusun bahan perencanaan strategis BPBD sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi misi organisasi;
- (13) Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
- (14) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan; dan
- (15) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

b) Kepala Sekretariat

Sekretariat di pimpin oleh Kepala Sekretariat yang bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana. Tugas pokok Kepala Sekretariat adalah membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya serta kerjasama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- (1) Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- (2) Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
- (3) Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- (4) Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- (5) Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- (6) engkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- (7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

c) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana, sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang penceahan, mitigas, dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigas dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigas dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan anáalisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigas dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- (5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perinta atasan.

d) Seksi Kedaruratan dan Logistik

Dalam melaksanakan tugas Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- (2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- (4) Pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- (5) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- (6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

e) Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana, yaitu sebagai berikut :

- (1) Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- (2) Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- (3) Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pasca bencana;
- (5) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Sumber Daya Perangkat Daerah

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar diantaranya terdapat sumber daya manusia dan juga sumber daya fisik berupa sarana dan prasarana.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia sebagai pelaksana kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar terdiri dari Aparatur Sipil Negara berjumlah 19 Orang dan Tenaga Harian Lepas 44 Orang dengan komposisi sebagai berikut :

1) Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Data tahun 2023, menunjukkan bahwa jumlah personil BPBD Kabupaten Karanganyar sejumlah 62 personil, yaitu terdiri dari :

- a) PNS golongan IV sebanyak 2 orang;
- b) PNS golongan III sebanyak 9 orang;
- c) PNS golongan II sebanyak 7 orang;
- d) Tenaga Harian Lepas sebanyak 44 orang.

Tabel I. 1 Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

| NO | Golongan | Jumlah Pegawai | | Jumlah | Ket. |
|----|---------------|----------------|-----------|-----------|------|
| | | Pria | Wanita | | |
| 1 | IV | 2 | - | 2 | |
| 2 | III | 7 | 2 | 9 | |
| 3 | II | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | I | - | - | - | |
| 5 | THL | 39 | 5 | 44 | |
| | Jumlah | 52 | 10 | 62 | |

2) Berdasarkan Eselon dan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan pendidikannya, pegawai di BPBD Kabupaten Karanganyar terdiri dari:

- a) Pendidikan Magister (S2) sebanyak 5 orang;
- b) Pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 10 Orang;
- c) Pendidikan Sarjana Muda/Diploma (D3) sebanyak 7 orang;
- d) Pendidikan SLTA sebanyak 40 orang.

Tabel I. 2 Pegawai BPBD Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Eselon dan Tingkat Pendidikan

| NO | Pendidikan | PNS | | | Tenaga | | Ket. |
|----|------------|--------|------|------|--------------|-------|------|
| | | Eselon | | | Harian Lepas | Total | |
| | | III/b | IV/a | Staf | | | |
| 1 | S2 | 1 | 4 | - | - | 5 | |
| 2 | S1 | | - | 5 | 5 | 10 | |
| 3 | Sarmud/D3 | - | - | 1 | 6 | 7 | |
| 4 | SLTA | - | - | 7 | 33 | 40 | |
| 5 | SLTP | - | - | - | - | - | |
| 6 | SD | - | - | - | - | - | |
| | Total | 18 | | | 44 | 62 | |

b. Sumber Daya Fisik (Sarana dan Prasarana)

Sementara untuk mendukung tugas dan fungsi tersebut BPBD Kabupaten Karanganyar memiliki sarana dan prasarana terdiri dari :

- 1) Tanah Perkantoran seluas 6,560 m2 yang di atasnya dibangun Gedung kantor yang terdiri dari Ruang kerja pimpinan, ruang kerja seksi, ruang pertemuan dan 1 unit Gudang.
- 2) Sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu :

Tabel I. 3 Sarana dan Prasana BPBD Kabupaten Karanganyar

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | Ket. |
|----|----------------------|---------|---------|------|
| 1 | Kendaraan roda empat | 10 unit | Baik | |
| 2 | Kendaraan roda dua | 11 Unit | Baik | |
| 3 | Kendaraan roda enam | 1 Unit | Baik | |
| 4 | Perahu Karet | 6 Unit | Baik | |
| 5 | Komputer | 11 Unit | Baik | |
| 6 | Laptop | 10 Unit | Baik | |
| 7 | Printer | 11 Unit | Baik | |

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | Ket. |
|----|-------------------------|---------|---------|------|
| 8 | LCD Proyektor | 2 Unit | Baik | |
| 9 | Printer scanner F4 | 3 Unit | Baik | |
| 10 | CCTV | 2 Unit | Baik | |
| 11 | Jaringan LAN | 2 Unit | Baik | |
| 12 | Tenda Posko | 2 Unit | Baik | |
| 13 | Tenda Pleton | 6 Unit | Baik | |
| 14 | Tenda Regu/Pengungsi | 2 Unit | Baik | |
| 15 | Tenda Keluarga | 6 Unit | Baik | |
| 16 | Portable Generating Set | 9 Unit | Baik | |
| 17 | Mesin Gergaji (chaisaw) | 14 Unit | Baik | |
| 18 | Rak Besi | 8 Buah | Baik | |
| 19 | Lemari Besi | 17 Buah | Baik | |
| 20 | Rak Kayu | 1 Buah | Baik | |
| 21 | Lemari Kaca | 5 Buah | Baik | |
| 22 | Lemari Kayu | 1 Buah | Baik | |
| 23 | Meja Rapat | 16 Unit | Baik | |
| 24 | Meja ½ Biro | 17 Unit | Baik | |
| 25 | Meja Staff | 22 Unit | Baik | |
| 26 | Filling Cabinet | 11 Unit | Baik | |
| 27 | Kursi Tamu | 2 stel | Baik | |
| 28 | Kursi Kerja Eselon III | 1 Unit | Baik | |
| 29 | Kursi Kerja Eselon IV | 4 Unit | Baik | |
| 30 | Televisi | 3 Unit | Baik | |
| 31 | Pesawat Telepon | 1 Unit | Baik | |
| 32 | Faximili | 1 Unit | Baik | |
| 33 | Camera | 3 Unit | Baik | |
| 34 | Handycam | 3 Unit | Baik | |
| 35 | Dispenser | 8 Unit | Baik | |

| No | Nama Barang | Jumlah | Kondisi | Ket. |
|----|--------------------------|---------|---------|------|
| 36 | Kipas Angin | 20 Unit | Baik | |
| 37 | AC | 10 Unit | Baik | |
| 38 | Sound System | 5 Unit | Baik | |
| 39 | Light Tower | 1 Unit | Baik | |
| 40 | Megaphone | 3 Unit | Baik | |
| 41 | Pesawat HT | 20 Unit | Baik | |
| 42 | Pesawat Portable RIG UHF | 2 Unit | Baik | |
| 43 | Kursi Staff | 8 buah | Baik | |
| 44 | Mesin Tempel | 7 Unit | Baik | |
| 45 | Alcone | 6 Unit | Baik | |
| 46 | Tabung Selam | 2 Unit | Baik | |
| 47 | Breathing Appartus | 2 Unit | Baik | |
| 48 | Electric Hammers | 1 Unit | Baik | |
| 49 | Alat pemotong baja/beton | 2 Unit | Baik | |
| 50 | Compressor selam | 1 Unit | Baik | |
| 51 | Early Warning System | 10 unit | Baik | |

D. Aspek Strategis

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian dan sinkronisasi perumusan kebijakan dan rencana kerja penanggulangan bencana daerah dan penanganan pengungsi;
2. Koordinasi pengintegrasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Pengkoordinasian mobilisasi sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana daerah;
4. Pengendalian penggunaan anggaran dan barang yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah;
5. Pengendalian dalam pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang; dan

6. Pemberian komando dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan bencana daerah.

E. Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa isu-isu strategis, yaitu :

1. Belum optimalnya penguatan masyarakat terkait dengan kesiapsiagaan bencana hal ini dapat dilihat dari Desa/Kelurahan Tangguh Bencana yang masih sedikit.
2. Masih kurangnya kapasitas aparatur dan masyarakat tentang penanggulangan bencana.
3. Belum optimalnya upaya mitigasi bencana.
4. Belum optimalnya ketersediaan data bencana.

F. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan LKjIP Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 -2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023.

G. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 disusun dengan sistematika yang mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan berisikan sasaran strategis, indikator kinerja yang digunakan, target dan satuan yang digunakan serta rincian program dan besaran anggaran dari tiap program.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja tujuan dan sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan juga realisasi anggaran. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja secara alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi pengguna sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2023 serta upaya/strategi dalam meningkatkan kinerja tahun 2024.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral, komprehensif dan impelentatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategis, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki peran sangat strategis dalam melaksanakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan 2 (dua) sasaran strategis, yaitu :

1. Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat;
2. Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah.

1. Keterkaitan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran serta Indikator Kinerja

a) Visi

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang akan dicapai selama lima tahun mendatang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“BERJUANG BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”

Visi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar mengacu pada visi ini, dimana BPBD adalah unsur yang bertugas membantu Sekretaris Daerah *ex-officio* Kepala BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai *leading sector* dan garda terdepan penanganan bencana di Kabupaten Karanganyar. BPBD berupaya memajukan Karanganyar dengan meningkatkan

mitigasi dan penanganan bencana di Kabupaten Karanganyar. Diharapkan dalam 5 tahun kedepan dapat terwujud Kabupaten Karanganyar yang Tangguh Bencana.

Visi ini juga menjadi semangat bagi BPBD dalam berjuang melaksanakan tugas penanggulangan bencana, yang kemudian lahir 6 (enam) semboyan di lingkungan SATGAS PB dan tentunya hal ini mengilhami dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif yang lain, disamping melaksanakan tugas dalam penanggulangan bencana, yaitu :

- 1) efektif - efisien;
- 2) cepat - tepat;
- 3) tanggap - tangkas - tangguh;
- 4) cermat - akurat;
- 5) berangkat cepat – pulang selamat;
- 6) tertib – akuntabel.

Dalam menghadapi tantangan tugas kedepan yang semakin kompleks namun tetap dapat dipertanggungjawabkan hasil kinerjanya. Sehingga masyarakat Karanganyar dapat menjadi tangguh dalam menghadapi bencana dapat terwujud.

b) Misi

Misi Pemerintah Kabupaten Karanganyar kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi, sebagai berikut :

- 1) Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh;
- 2) Pemberdayaan Perekonomian Rakyat;
- 3) Pendidikan Gratis SD/SMP dan Kesehatan Gratis;
- 4) Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan;
- 5) Peningkatan Kualitas Keagamaan, Sosial, Budaya, Pemberdayaan Perempuan, Pemuda dan Olahraga.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018 – 2023, tugas dan fungsi BPBD termasuk dalam misi ke-1 yaitu **Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh** dengan Tujuan yang sesuai dengan tugas fungsi BPBD adalah **mewujudkan kualitas pembangunan infrastruktur yang memadai dan berwawasan lingkungan**. Sedangkan sasaran dalam RPJMD adalah **Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana**.

Mengacu pada misi ini maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah berupaya meningkatkan mitigasi dan penanganan bencana dengan bekerjasama dengan masyarakat, pemangku kepentingan dan juga lembaga/organisasi kemasyarakatan yang

bergerak di bidang sosial khususnya penanggulangan bencana agar tercipta sinergitas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Karanganyar.

Visi dan misi adalah untuk menjembatani kondisi masa kini dengan kondisi masa depan, sekaligus juga berusaha untuk mengklarifikasi arah dan tujuan organisasi.

2. Tujuan Dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta merupakan hal yang akan di capai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi misi Kabupaten Karanganyar tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki tujuan yaitu meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana. Tujuan tersebut untuk mewujudkan Ketangguhan Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi bencana. Tangguh dimaknai sebagai kemampuan untuk mampu bangkit dari dampak dan akibat bencana ke arah pembangunan yang lebih baik. Tujuan tersebut bermuara kepada upaya melindungi masyarakat dari ancaman bencana melalui peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perilaku saat terjadi bencana. Serta peningkatan kapasitas dalam rangka menciptakan system penanggulangan bencana yang terintegrasi, sistematis dan handal. Indikator Kinerja tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah persentase berkurangnya korban bencana.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan bulanan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya daerah dalam kegiatan BPBD. Sasaran BPBD menurut Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat
- b. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah.

Indikator sasaran BPBD adalah persentase desa/kelurahan Tangguh bencana dan Nilai SAKIP. Tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel II. 1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | RUMUS | SATUAN | TARGET | | | | |
|----|--|---|----------------------------------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| I | Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana | | | Jumlah korban bencana/ Jumlah Penduduk Diwilayah Rawan Bencana x 100% | % | 0,08 | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| II | | 1.berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada Masyarakat. | % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | Desa/Kelurahan Tangguh Bencana/ Desa Rawan Bencana x 100% | % | 2,82 | 4,52 | 4,52 | 8,47 | 9,04 |
| | | 2.Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | NILAI SAKIP | | SKOR | 63,08 | 65,21 | 70,52 | 71,00 | 72,00 |

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023 yang setiap tahunnya di jabarkan dalam dokumen Rencana Kinerja Anggaran (RKA) tahun 2023 selanjutnya di tetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023

| No | Sasaran | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Tahun 2023 |
|----|--|---------------------------------|--------|------------|
| | | | | Target |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat | %Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | % | 10,73 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | Nilai SAKIP | Skor | 72 |

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan bagian dari rencana kinerja tahunan yang menjadi bagian terpenting bagi pimpinan instansi di lingkungan pemerintah daerah karena merupakan wahana proses yang akan memberikan prospektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tak terarah. Perjanjian Kinerja tahun 2023 adalah merupakan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar dan Kepala Daerah dalam melaksanakan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023. Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

- a. Wujud komitmen nyata antara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Karanganyar selaku pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;
- b. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Kineja Tahunan (RKT), IKU dan anggaran. Perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Karanganyar Tahun 2023, secara lengkap pada table berikut.

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----------|--|----------------------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat | % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | 10,73 |
| 2. | Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah | Nilai SAKIP | 72 |

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun anggaran 2023 melaksanakan proram dengan anggaran sebesar Rp 6.875.944.050. Anggaran belanja langsung langsung tahun 2023 dialokasikan untuk pencapaian sasaran stragtegis adalah sebesar Rp 2.634.910.500,00. Sedangkan untuk program pendukung sebesar Rp 4.241.033.550,00 rincian anggaran untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II. 4 Pemetaan Program dan Anggaran Per Sasaran Strategis BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Program | Anggaran | % |
|----|--|---|---------------------|-------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 |
| 1 | Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat | Penanggulangan Bencana | Rp 2.634.910.500,00 | 38.32 |
| 2 | Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Rp 4.241.033.550,00 | 61.68 |

D. Instrumen Pendukung

Aplikasi atau inovasi yang mendukung pencapaian kinerja di Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah antara lain :

1. Sistem Informasi Pelayanan Melalui Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi) terkait kebencanaan di Kabupaten Karanganyar dengan calling (0271) 495997, 08112637243 TRC.
2. Inovasi Pelayanan Masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Karanganyar melayani masyarakat selama 24 jam 7 hari tanpa libur.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar merupakan wujud kewajiban BPBD Kabupaten Karanganyar dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok serta fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pengukuran capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indicator kinerja utama pada masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap indicator kinerja utama menghasilkan nilai capaian strategis.

Untuk mengetahui tingkat ketercapaian kinerja pada tahun 2023, maka dilakukan pengukuran capaian kinerja masing-masing tujuan dan sasaran melalui indicator kinerja utama perangkat daerah sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tahapan sebagai berikut :

A. Metode Pengukuran

1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Kerangka Pengukuran kinerja Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan RB No. 12 tahun 2015 pada Lembar Kriteria Evaluasi dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{TARGET} - (\text{REALISASI} - \text{TARGET})}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{(2 \times \text{TARGET}) - \text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran menggunakan interpretasi skala nilai dan kriteria penilaian untuk kinerja organisasi yang dilaporkan dalam bentuk *outcome*, selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja.

Tabel III. 1 Kriteria Penilaian

| Skala Nilai | Kategori Penilaian |
|----------------|--------------------|
| ≥ 100 | Sangat Baik |
| ≥ 85 s.d < 100 | Baik |
| ≥ 65 s.d < 85 | Cukup Baik |
| ≥ 50 s.d < 65 | Kurang Baik |
| < 50 | Tidak Baik |

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU digunakan sebagai keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Pencapaian Indikator Tujuan

Adapun tujuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Karanganyar tahun 2018-2023, sebagai berikut:

- a. Tujuan : Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana

Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana, dengan indikator tujuan yaitu % berkurangnya korban bencana alam (korban meninggal, korban luka, korban harta), dapat dijelaskan sebagai berikut pada tabel III.2

Tabel III. 2 Indikator Tujuan dan Formulasi Perhitungan

| Tujuan | Indikator Tujuan | Rumus |
|--|---|--|
| Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana | % berkurangnya korban bencana alam (korban meninggal, korban luka, korban harta) | $\frac{\text{Jumlah korban bencana}}{\text{jumlah penduduk diwilayah rawan bencana}} \times 100\%$ |

Indikator tujuan persentase berkurangnya korban bencana alam (korban meninggal, korban luka dan korban harta) memiliki target 0,05 pada tahun 2023. Dari hasil pengukuran capaian indikator tujuan diperoleh data sebagai berikut :

1) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase berkurangnya korban bencana (korban meninggal, korban luka dan korban harta) merupakan indikator tujuan pada Tujuan Renstra 2018-2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. Pada tahun 2023, Persentase berkurangnya korban bencana (korban meninggal, korban luka dan korban harta) memiliki realisasi 0,15 dengan capaian 33%. Selain karena bencana yang tidak dapat di prediksi, tahun 2023 juga mengalami cuaca ekstrem yaitu El Nino yang merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut diatas kondisi normal yang terjadi di samudera pasifik bagian tengah yang meningkatkan potensi pertumbuhan awan sehingga mengurangi curah hujan (kemarau panjang) di beberapa daerah. Hal tersebut menambah korban terdampak bencana menjadi meningkat.

Tabel III. 3 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023 Capaian Indikator Tujuan

| Indikator Tujuan | Satuan | Tahun 2023 | | | Kategori | Sumber Data |
|---|--------|------------|-----------|---------|------------|----------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| % berkurangnya korban bencana (korban meninggal, korban luka, korban harta) | % | 0,05 | 0,15 | 33% | Tidak Baik | BPBD Kabupaten Karanganyar |

2) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi % berkurangnya korban bencana (korban meninggal, korban luka, korban harta) pada tahun 2021 tercapai sebesar 100%, namun menurun pada tahun 2022 dan 2023 dengan capaian sebesar 42% dan 33%.

Tabel III. 4 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya Capaian Indikator Tujuan

| Indikator Kinerja | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|---|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| % berkurangnya korban bencana (korban meninggal, korban luka, korban harta) | 0,06 | 0,06 | 100% | 0,05 | 0,12 | 42% | 0,05 | 0,15 | 33% |

3) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 belum terlampaui. Realisasi tujuan kinerja untuk indikator % berkurangnya korban bencana (korban meninggal, korban luka, korban harta) tahun 2023 adalah 0,15. Sedangkan pada target akhir renstra adalah sebesar 0,05.

Tabel III. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | Target Akhir Renstra 2023 | Tingkat Capaian (%) |
|---|--------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| % berkurangnya korban bencana (korban meninggal, korban luka, korban harta) | % | 0,15 | 0,05 | 33,33 |

4) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pada tahun 2023 tidak mencapai target yang di tetapkan dikarenakan jumlah korban yang terdampak bencana lebih banyak dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya cuaca ekstrem yang menyebabkan kemarau dan kekeringan yang cukup panjang dan juga angin ribut.

Rencana tindak lanjut penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai tujuan % berkurangnya korban bencana (korban meninggal, korban luka dan korban harta) antara lain dengan meningkatkan peran serta yang aktif dari pemerintah dan dunia usaha dengan melibatkan masyarakat, akademisi dan media massa. Selain menggunakan APBD, ketertlibatan dunia usaha sebagai CSR dapat membantu upaya mitigasi bencana sebagai upaya dalam meminimalkan korban terdampak bencana. Selain itu, dapat menganalisis permasalahan dalam penanganan bencana secara periodik, agar dalam penanganan bencana dapat cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Capaian Indikator Sasaran

Pada tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai perubahan perjanjian kinerja Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang masing-masing terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang harus di wujudkan pada tahun 2023. Adapun analisi capaian kinerja per sasaran strategis di uraikan sebagai berikut.

Tabel III. 6 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % |
|----|--|---|--------|--------|-----------|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat | % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | % | 10,73 | 18,08 | 168 |
| 2. | Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | Nilai SAKIP | Skor | 72 | 69,65 | 97 |

Target pembentukan Desa Tangguh Bencana pada tahun 2023 adalah sebanyak 16 Desa Tangguh Bencana. Sedangkan, pada tahun 2023 telah terealisasi Desa Tangguh Bencana sebanyak 32 Desa Tangguh Bencana. Target Nilai SAKIP tahun 2023 adalah 72.

1) Sasaran Strategis : Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat

Sasaran strategis ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana dengan target 10,73%.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan indikator kinerja utama pada sasaran strategis 1 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. Capaian kinerja ini di peroleh melalui desa/kelurahan Tangguh bencana/desa rawan bencana X 100%. Pada tahun 2023 telah terbentuk 32 Desa Tangguh Bencana yang tidak hanya di danai melalui APBD, tetapi juga terbentuk dari pemerintah desa melalui pemanfaatan dana desa yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Selain itu, Desa Tangguh Bencana terbentuk dengan kerjasama antara BPBD Kabupaten Karanganyar dan juga akademisi universitas.

Berdasarkan hasil perhitungan dapat di ketahui bahwa target % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana telah tercapai bahkan melebihi target yang telah di tetapkan. Target yang di tetapkan adalah 10,73% sedangkan realisasinya adalah 18,08% sehingga capaian kinerja rata-ratanya adalah 168%.

Tabel III. 7 Capaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | | Kategori | Sumber Data |
|----------------------------------|--------|------------|-----------|---------|-------------|----------------------------|
| | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | % | 10,73 | 18,08 | 168 | Sangat baik | BPBD Kabupaten Karanganyar |

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana pada tahun 2021 sebesar 7,34 % tahun 2022 sebesar 10,17% dan terus meningkat pada tahun 2023 sebesar 18,08%.

Tabel III. 8 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya untuk Sasaran Strategis 1

| Indikator Kinerja | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|----------------------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | 4,52 | 7,34 | 162 | 8,47 | 10,17 | 120 | 10,73 | 18,08 | 168 |

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui. Target kinerja untuk indikator % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana tahun 2023 adalah 18,07%. Sedangkan pada target akhir renstra adalah sebesar 9,04%.

Tabel III. 9 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah untuk Sasaran Strategis

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | Target Akhir Renstra 2023 | Tingkat Capaian (%) |
|----------------------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| % Desa/Kelurahan Tangguh Bencana | % | 18,08 | 9,04 | 200 |

d) Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan terpenuhinya capaian indikator persentase Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di dukung oleh :

- (1) Penanggulangan Bencana saat ini diarahkan pada upaya pengurangan risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan pemerintah dan masyarakat dan peringatan dini.
- (2) Menekankan pembangunan kesiapsiagaan berbasis masyarakat dan peringatan dini.
- (3) Penanganan kedaruratan dengan segera yang melibatkan peran serta pemerintah, relawan dan pemerintah desa serta masyarakat.

e) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran strategis berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat adalah **Program Penanggulangan Bencana**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- (1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- (2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- (3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- (4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah sebesar Rp 2.634.910.500,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 1 adalah Rp 2.564.619.429,- (97,33%) sehingga terdapat selisih Rp 70.291.071,- atau sebesar 2,67%.

2) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah

Sasaran strategis 2 ini dicapai dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai SAKIP OPD dengan nilai 69,65.

a) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2023

Tabel III. 10 Capaian Target dan Realisasi Sasaran Strategis 2 Tahun 2023

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2023 | | | Kategori | Sumber Data |
|-------------------|--------|------------|-----------|-----|----------|-----------------------------------|
| | | Target | Realisasi | % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Nilai SAKIP | Skor | 72 | 69,95 | 97% | Baik | Penilaian dari Inspektorat Daerah |

b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2021, 2022 dan 2023, realisasi Nilai Sakip adalah 2021 dengan nilai 70,52, tahun 2022 dengan nilai 69,65.

Tabel III. 11 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya untuk Sasaran Strategis 2

| Indikator Kinerja | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | |
|-------------------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|-----------|---------|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nilai SAKIP | 65.5 | 70.52 | 108% | 71 | 69.65 | 98% | 72 | 69.65 | 97% |

c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 sudah terlampaui sebesar 104%. Target kinerja untuk indikator Nilai Sakip adalah 69,65 Sedangkan pada target akhir renstra adalah sebesar 67.

Tabel III. 12 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah untuk Sasaran Strategis 2

| Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi 2023 | Target Akhir Renstra 2023 | Tingkat Capaian (%) |
|-------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Nilai SAKIP | Skor | 69,65 | 67 | 104% |

d) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/Kegagalan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah adalah **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**, dengan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Anggaran untuk mendukung sasaran kinerja 2 adalah sebesar Rp 4.241.033.550,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 2 adalah Rp 3.886.746.525,- (91,65%) sehingga terdapat selisih Rp 354.287.025,- atau sebesar 8,35%.

3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah kemampuan untuk mengukur keberhasilan suatu kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan suatu sumber daya dengan penggunaan yang sebenarnya atau yang terealisasi. Dalam laporan kinerja ini akan di jelaskan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel III. 13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Tujuan | Sasaran Strategis | Capaian Kinerja (%) | Penyerapan Anggaran (%) | Tingkat Efisiensi (%) |
|------------------|--|--|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Meningkatnya mitigasi dan penanganan bencana | Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat | 200,00 | 97,33 | 2,67 |
| 2 | | Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah | 97,00 | 91,65 | 8,35 |
| Rata-rata | | | 148,50 | 94,49 | 5,51 |

Berdasarkan tabel III.13 diatas, pada tahun 2023 rata-rata Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar 148,5% atau kategori “sangat baik” dan realisasi penyerapan anggaran sebesar 94,49% serta menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 5,51%.

Sasaran strategis “Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat” yang didukung dengan 1 program kegiatan mempunyai anggaran sebesar Rp 2.634.910.500,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis adalah Rp 2.564.619.429,- (97,33%) sehingga terdapat selisih Rp 70.291.071,- atau sebesar 2,67%.

Sasaran strategis 2 “Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah “ yang di dukung dengan 1 program kegiatan memiliki anggaran sebesar Rp 4.241.033.550,-. Realisasi anggaran untuk mendukung pencapaian sasarn strategis 2 adalah Rp 3.886.746.525,- (91,65%) sehingga terdapat selisih Rp 354.287.025,- atau sebesar 8,35%.

4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan penunjang keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang memerinci dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai khususnya yang langsung bersentuhan dengan kepentingan pelayanan masyarakat / *stakeholders* dalam bentuk kegiatan menjemput bola.

Program/Kegiatan/Sub KegiatanBadan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - b) Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

b. Program Penanggulangan Bencana

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - a) Sosialisasi, komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per jenis Bencana)
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana
 - a) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/kota

- b) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - c) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - d) Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan dan kesiapsiagaan
 - e) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - f) Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - g) Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - a) Pencarian, pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - b) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota
 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - a) Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Bencana Kabupaten/kota
 - b) Pengelolaan dan pemanfaatan system informasi kebencanaan
 - c) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

C. Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2023, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar mendapat dukungan anggaran sebesar Rp 6.875.944.050,00 dan sampai per 31 Desember telah merealisasikan sejumlah Rp 6.451.365.954,00 atau sebesar 93,83%. Adapun realisasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut :

Tabel III. 14 Realisasi Anggaran BPBD Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|----|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4.241.033.550 | 3.886.746.525 | 91,65 |
| 2. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.975.000 | 37.006.250 | 97,45 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|----------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 3. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 37.975.000 | 37.006.250 | 97,45 |
| 4 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.146.504.050 | 1.945.741.197 | 90,65 |
| 5 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.141.504.050 | 1.940.785.297 | 90,63 |
| 6 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 5.000.000 | 4.955.900 | 99,12 |
| 7 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 99.450.000 | 96.320.000 | 96,85 |
| 8 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 99.450.000 | 96.320.000 | 96,85 |
| 9 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 273.985.000 | 273.538.190 | 99,84 |
| 10 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 12.900.000 | 12.900.000 | 100,00 |
| 11 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 16.000.000 | 15.947.700 | 99,67 |
| 12 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 14.000.000 | 13.946.800 | 99,62 |
| 13 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 12.500.000 | 12.496.200 | 99,97 |
| 14 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 2.760.000 | 2.580.000 | 93,48 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----------|---|----------------------|--------------------|--------------|
| 15 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 208.825.000 | 208.672.490 | 99,93 |
| 16 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 7.000.000 | 6.995.000 | 99,93 |
| 17 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 1.076.787.500 | 958.146.500 | 88,98 |
| 18 | Pengadaan Mebel | 21.000.000 | 20.800.000 | 99,05 |
| 19 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 55.787.500 | 55.062.500 | 98,70 |
| 20 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.000.000.000 | 882.284.000 | 88,23 |
| 21 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 99.000.000 | 82.355.638 | 83,19 |
| 22 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3.000.000 | 2.994.000 | 99,80 |
| 23 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 96.000.000 | 79.361.638 | 82,67 |
| 24 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 507.332.000 | 493.638.750 | 97,30 |
| 25 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 414.851.000 | 401.843.250 | 96,86 |
| 26 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 72.000.000 | 71.395.500 | 99,16 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 27 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 20.481.000 | 20.400.000 | 99,60 |
| 28 | Program Penanggulangan Bencana | 2.634.910.500 | 2.564.619.429 | 97,33 |
| 29 | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota | 116.750.000 | 116.143.000 | 99,48 |
| 30 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | 116.750.000 | 116.143.000 | 99,48 |
| 31 | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 521.670.000 | 509.084.850 | 97,59 |
| 32 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 150.000.000 | 145.100.000 | 96,73 |
| 33 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota | 148.000.000 | 143.999.000 | 97,30 |
| 34 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 35.420.000 | 33.180.000 | 93,68 |
| 35 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 50.000.000 | 50.000.000 | 100,00 |
| 36 | Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota | 95.000.000 | 94.999.600 | 100,00 |
| 37 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | 25.000.000 | 24.056.250 | 96,23 |

| No | Program/Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % Capaian |
|---------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 38 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | 18.250.000 | 17.750.000 | 97,26 |
| 39 | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana | 1.931.490.500 | 1.875.144.857 | 97,08 |
| 40 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 1.726.490.500 | 1.671.215.157 | 96,80 |
| 41 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | 205.000.000 | 203.929.700 | 99,48 |
| 42 | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana | 65.000.000 | 64.246.722 | 98,84 |
| 43 | Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | 21.000.000 | 21.000.000 | 100,00 |
| 44 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan | 5.000.000 | 4.358.722 | 87,17 |
| 45 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | 39.000.000 | 38.888.000 | 99,71 |
| Jumlah | | 6.875.944.050 | 6.451.365.954 | 93,83 |

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penilaian terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan indikator kinerja utama Renstra 2018-2023, dapat disimpulkan bahwa dalam penyelesaian isu strategis yang tercantum dalam dokumen Renstra, kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 1 Misi, 1 Tujuan dan 2 Sasaran Strategis yang diukur dengan 2 indikator kinerja. Untuk capaian indikator tujuan utama rata-rata tercapai 33% atau kategori “Tidak Baik” atau untuk indikator Kinerja Utama rata-rata tercapai 148,50% atau kategori “Sangat Baik”.

Secara rinci dapat dijelaskan dari hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Rata-rata pencapaian sasaran strategis 1 “Berkurangnya resiko bencana yang berdampak pada masyarakat” sebesar 168% dengan kategori sangat baik.
- b. Rata-rata pencapaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah” sebesar 97% dengan kategori baik.

Hasil ini merupakan representasi dari kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditunjukkan oleh seluruh seksi dan sekretariat yang telah memberikan dukungan bagi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diterapkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar 2018-2023.

Pencapaian target kinerja dari 2 sasaran strategis Tahun 2018-2023 untuk tahun 2023 dialokasikan anggaran sebesar Rp 6.875.944.050,00 dan telah merealisasikan sejumlah Rp 6.451.365.954,00 atau sebesar 93,83%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sampai dengan akhir Tahun 2023 rata-rata capaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 tercapai sebesar 148,50% atau kategori “Sangat Baik”. Hal tersebut artinya sudah melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja dimaksud tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, kendala yang terjadi pada tahun sebelumnya telah dievaluasi

sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja di tahun 2024. Sasaran program yang belum tercapai 100% akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2024 nantinya dapat dicapai dengan lebih baik.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja


Dalam rangka meningkatkan capaian kinerja ditahun berikutnya, terdapat beberapa langkah-langkah strategis antara lain sebagai berikut :

1. Mengurangi resiko bencana dilakukan dengan meningkatkan kapasitas dan membangun infrastruktur di seluruh lini secara terencana dan terpadu sesuai kebutuhan
2. Membangun system peringatan dini yang terkoneksi dengan provinsi dan pusat serta lembaga lainnya.
3. Penyebaran informasi penanggulangan bencana secara periodik, cepat dan akurat.
4. Melibatkan unsur pemuka masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Mempercepat regulasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
6. Memperkuat kinerja antar lembaga terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 yang menggambarkan capaian kinerja sasaran strategis dalam mendukung pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Semoga dokumen ini dapat berguna bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar khususnya sebagai evaluasi untuk perbaikan dimasa depan, serta bagi segenap pihak yang berkepentingan.

Karanganyar, 31 Januari 2024

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



HENDRO PRAYITNO, S.H., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19760531 199503 1 001